

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat seiring dengan era reformasi yang menitikberatkan pelaksanaan kebijakan pemerintah, otonomi daerah, serta desentralisasi fiskal yang memberi perhatian lebih besar kepada penyelenggaraan pemerintah daerah (Leunupun *et al.*, 2022). Dengan adanya desentralisasi, daerah diharapkan mampu mengelola keuangannya sendiri dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat (Qisthina *et al.*, 2022). Keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan yang baik (Ardelia *et al.*, 2022). Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah. Hal tersebut untuk memastikan program pembangunan berjalan dengan baik, lancar serta kesejahteraan masyarakat meningkat (Rahman & Saputra, 2022). Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki peranan krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah (Armereo, 2021). Dalam mengatur pengelolaan keuangan daerah, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pengganti dari PP Nomor 58 Tahun 2005 (Basri, 2021). Perubahan PP tersebut dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerbitan PP Nomor 12 Tahun 2019 memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di

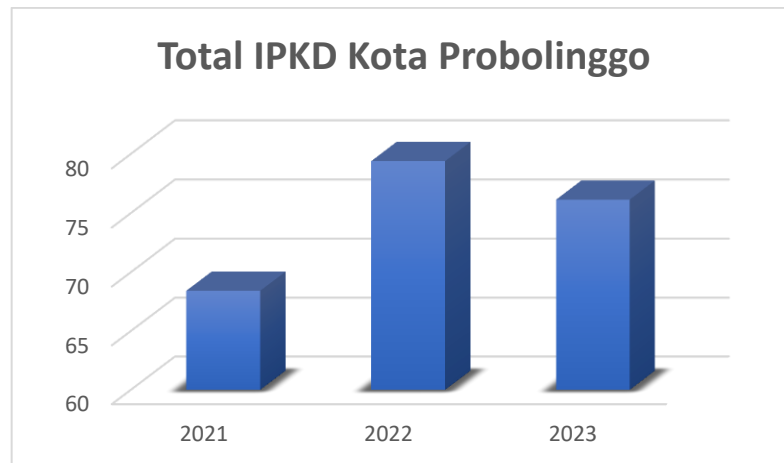
Indonesia, termasuk perubahan fundamental pada struktur APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) (Saputri *et al.*, 2021). Pengelolaan keuangan yang baik dalam pemerintahan akan berdampak pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik (Sudrajat, 2024). Dengan adanya pemerintahan yang efektif, mekanisme kontrol yang memadai, serta keterlibatan publik, maka alur pengelolaan keuangan termasuk perencanaan, eksekusi, dan pelaporan anggaran akan menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (Dewi & Wulandari, 2023). Semakin efektif pelaksanaan akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah, maka mutu pengelolaan pemerintah daerah pun akan turut meningkat (Edowati *et al.*, 2021).

Keterkaitan erat antara transparansi serta akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen penting yang turut menentukan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Transparansi serta akuntabilitas merupakan dua komponen krusial yang diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan yang transparan memberikan manfaat positif bagi pemerintah daerah, karena mempermudah publikasi hasil kinerja keuangan, aktivitas yang dilakukan dan proses pengambilan keputusan selama kurun waktu tertentu (Sari *et al.*, 2020). Dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya menggunakan rasio keuangan daerah. Akan tetapi, ada juga alat ukur lain untuk menilai kinerja keuangan dan tata kelola pemerintahan. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan tujuan untuk menilai kebijakan keuangan khususnya pada pemerintah daerah, apakah sudah memenuhi standar yang berlaku atau belum (Harahap, 2020). Hasil

penilaian kinerja keuangan digunakan untuk membuat kebijakan keuangan yang lebih baik di masa depan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2020 Tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) dianggap sebagai ukuran kinerja pemerintah yang lebih akurat dan objektif (Yusmina & Siswantoro, 2023). IPKD mencakup berbagai aspek keuangan daerah seperti kemampuan fiskal, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran. IPKD tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan keuangan yang lebih baik. Terdapat enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur IPKD meliputi : Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini audit BPK (Badan Pemeriksa keuangan) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) (Pemerintah Indonesia, 2020). Pemerintah daerah yang memiliki IPKD tinggi cenderung menunjukkan kualitas tata kelola keuangan yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik dan investor dalam mendukung pembangunan daerah. Namun dalam prakteknya, banyak daerah masih mengalami fluktuasi nilai IPKD yang disebabkan oleh berbagai faktor. Maka dari itu, untuk meningkatkan IPKD diperlukan strategi yang komprehensif. IPKD tidak hanya dapat berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga sebagai pedoman dan penyusunan kebijakan fiskal yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, pemerintah daerah mampu merancang

anggaran yang efektif dan bertanggung jawab demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 1.1 Diagram Total IPKD Kota Probolinggo

Pengukuran IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) telah dilakukan di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Timur tepatnya di Kota Probolinggo. Kota Probolinggo sudah mendapatkan opini audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas LKPD selama 5 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2019-2023. IPKD Kota Probolinggo masih menunjukkan fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, yang mencerminkan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah, fenomena ini dapat dilihat pada gambar 1.1. Meskipun demikian, pada tahun 2022 Kota Probolinggo menduduki peringkat 5 di Kota seluruh Indonesia pada kemampuan keuangan daerah sedang. Dan pada saat tahun 2023 turun menjadi peringkat 6. Sebagai indikator utama untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan, IPKD dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk perencanaan anggaran, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal. Ketidakstabilan nilai IPKD dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),

pengalokasian belanja daerah, dan mekanisme pengawasan keuangan yang ada. Meskipun, upaya untuk meningkatkan tata kelola keuangan terus dilakukan, tantangan seperti kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas sistem pencatatan keuangan, dan koordinasi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masih menjadi hambatan yang signifikan. Untuk meningkatkan stabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan, diperlukan strategi yang lebih terstruktur, seperti memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memanfaatkan teknologi informasi dalam manajemen keuangan daerah. Transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan anggaran juga merupakan faktor penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana daerah. Penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pengelolaan keuangan agar kelemahan yang menyebabkan fluktuasi IPKD dapat teridentifikasi dan diperbaiki. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, serta lembaga pengawas seperti inspektorat dan BPK merupakan faktor kunci dalam membangun sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan adanya upaya perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan Kota Probolinggo dapat mencapai IPKD yang lebih baik, yang mencerminkan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Fenomena inilah yang menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, masih saja terdapat tantangan dalam mencapai stabilitas IPKD yang lebih baik.

Penelitian tentang pengelolaan keuangan daerah sudah banyak dilakukan tetapi yang mengaitkan dengan IPKD hanya beberapa penelitian saja. Penelitian (Putri, 2023) yang menjelaskan tentang analisis instrumen IPKD sebagai akuntabilitas keuangan daerah juga menunjukkan pengukuran akuntabel dari

komponen dalam IPKD, namun hanya terbatas pada dimensi dua yaitu pengalokasian anggaran dalam APBD dan dimensi empat yaitu penyerapan anggaran. Penelitian (Salsabila, 2022) hanya menguji pengaruh IPKD terhadap kinerja keuangan daerah dan menemukan bahwa semua dimensi dalam IPKD memiliki pengaruh signifikan yang berbeda terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan IPKD sebagai instrumen evaluasi langsung untuk menindaklanjuti rendahnya nilai IPKD di Kabupaten Klaten. Dari beberapa penelitian sebelumnya, terdapat beberapa celah yang mendasari penelitian ini. Sebagian besar studi yang dilakukan membahas hubungan antara faktor-faktor seperti transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas perencanaan anggaran terhadap IPKD, tanpa mengeksplorasi strategi spesifik yang diterapkan pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai IPKD tersebut.

Penelitian ini penting untuk diteliti agar dapat mengevaluasi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Kota Probolinggo sebagai salah satu wilayah otonom di Provinsi Jawa Timur memiliki dinamika tersendiri dalam penyelenggaraan keuangan daerahnya, sehingga layak dijadikan lokasi studi dalam analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah melalui pendekatan IPKD. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai sejauh mana strategi pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan telah memberikan dampak nyata terhadap kualitas tata kelola keuangan daerah. Selain itu, hasilnya juga diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan yang lebih baik kedepannya. Fenomena dan faktor-faktor yang muncul di lapangan menjadi dasar kuat pemilihan Kota Probolinggo sebagai lokasi studi dalam menganalisis kinerja pengelolaan keuangan daerah melalui pendekatan IPKD.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai tindak lanjut dari uraian latar belakang, rumusan masalah yang akan diteliti dalam studi ini yaitu bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kota Probolinggo ditinjau dari dimensi IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kota Probolinggo ditinjau dari dimensi IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penerapan IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) sebagai instrumen evaluasi kinerja keuangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperjelas hubungan antara strategi pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dengan dampaknya terhadap perubahan nilai IPKD, baik peningkatan maupun penurunan.

1.4.2. Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Kota Probolinggo

Melalui hasil penelitian ini, pemerintah daerah dapat memperoleh rekomendasi kebijakan yang bertujuan meningkatkan nilai IPKD serta kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui pendekatan strategi yang lebih efektif dan

fleksibel. Selain itu, penelitian ini juga membantu pemerintah daerah dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit BPK, serta bagaimana tata kelola keuangan dapat didorong untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel.

b. Bagi Pembuat kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi pembuat kebijakan di tingkat pusat maupun daerah dalam merancang regulasi yang lebih tepat sasaran. Dengan data dan analisis yang disajikan, penelitian ini diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah di lapangan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memiliki manfaat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih aktif dalam memantau pelaksanaan kebijakan keuangan daerah serta turut serta dalam memberikan masukan untuk proses pengambilan keputusan yang lebih partisipatif.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk studi lanjutan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan penerapan IPKD di berbagai wilayah. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi langsung terhadap perbaikan tata kelola keuangan daerah, tetapi juga menciptakan peluang untuk penelitian lebih mendalam yang bertujuan meningkatkan sistem keuangan daerah di masa depan.